

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH
YANG DI TETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI
TIMBULUN KABUPATEN SIJUNJUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh:

PRIYA PUTRI DEWINDA

NIM. 2420122023

DOSEN PEMBIMBING:

- I. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
- II. Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG DI TETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI TIMBULUN KABUPATEN SIJUNJUNG

*Priya Putri Dewinda, 2420122023, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2026.*

ABSTRAK

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan menjadi lokasi terjadinya tumpang tindih antara hak milik atas tanah masyarakat dengan penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah.. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tumpang tindih antara sertifikat hak milik atas tanah dengan penetapan kawasan hutan di Nagari Timbulun, Kabupaten Sijunjung, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perolehan hak milik atas tanah sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, proses pendaftaran tanah yang dilakukan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik setelah adanya penetapan kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki masyarakat pada awalnya berasal dari tanah ulayat nagari yang dialihkan menjadi hak milik dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah adanya penetapan kawasan hutan, sebagian tanah yang telah bersertipikat masuk ke dalam kawasan hutan sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik tetap diberikan karena sertifikat merupakan alat bukti hak yang sah. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme inventarisasi, verifikasi, PPTPKH, TORA, *enclave*, atau perubahan batas kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pertanahan dan kehutanan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat tanpa mengabaikan fungsi kawasan hutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Sertipikat, Kawasan Hutan.

**LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF OWNERSHIP RIGHTS TO LAND
DESIGNED AS A PROTECTED FOREST AREA IN NAGARI TIMBULUN,
SIJUNJUNG REGENCY**

**Priya Putri Dewinda, 2420122023, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,
2026**

ABSTRACT

Sijunjung Regency is one of the regencies in West Sumatra Province that has a fairly large forest area and is a location where there is an overlap between community land ownership rights and the determination of protected forest areas by the government. This research is motivated by the overlap between land ownership certificates and the determination of forest areas in Nagari Timbulun, Sijunjung Regency, which creates legal uncertainty for land rights holders. This study aims to analyze the acquisition of land ownership rights before being designated as a protected forest area, the land registration process carried out, and the form of legal protection for land rights holders after the determination of the protected forest area. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical nature. Data were obtained through interviews, field observations, and literature studies, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that land owned by the community initially originated from customary land in the nagari which was transferred to ownership rights and registered in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. However, after the determination of the forest area, some of the land that had been certified was included in the forest area, thus giving rise to legal problems. Legal protection for land ownership certificate holders remains guaranteed, as they constitute valid proof of ownership. This protection can be achieved through inventory, verification, PTPKH (Finance and Land Management Agency), TORA (Regional Land Acquisition and Reform), enclave mechanisms, or changes to forest area boundaries. Therefore, synchronization of land and forestry policies is necessary to ensure legal certainty, justice, and the protection of community rights without neglecting the function of forest areas.

Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Certificates, Forest Areas.